

## INTISARI

Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan terkait penanggulangan krisis akibat Pandemi Covid-19, yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar yang pada awalnya di implementasikan di DKI Jakarta sebagai episentrum dari penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia. Namun, efek dari perbatasan langsung antar kota dan mobilisasi yang begitu tinggi dari kota-kota satelit DKI Jakarta yaitu BoDeTaBek membuat Kota Bekasi menjadi salah satu kota dengan zona risiko tinggi, membuat Pemerintah Kota Bekasi juga mengeluarkan Peraturan yang berbentuk Mayor Regulation Number 22 Year 2020. Dikarenakan implementasi dari kebijakan ini masih tergolong baru untuk masyarakat, maka muncul lah pro dan kontra di dalam kebijakan ini dan membuat pemerintah terus memperbaharui kebijakan tersebut. Maka dari itu peneliti ingin menganalisis hubungan dari sejauh mana public percaya atas kebijakan tersebut dan bagaimana posisi kepercayaan publik tersebut pada kinerja pemerintah Kota Bekasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian deskriptif guna mengetahui jawaban yang lebih dalam dari kedua sisi subjek penelitian. Penelitian ini juga menggunakan wawancara dan observasi sebagai jenis data. Wawancara penelitian dilaksanakan bersama dengan Bagian Tata Kelola Sub. Seksi Pembinaan Tata Usaha Setda Kota Bekasi, Manajer Humas Setda Kota Bekasi, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Sekretaris Seksi Ketertiban Umum SATPOL-PP Kota Bekasi pada sisi pemerintah daerah. Kepala Dinas RW.010 Desa Harapan Baru Kota Bekasi sebagai jembatan publik dengan pemerintah. Serta, penulis konten pada ThinkPolicy.id, barista Kopi Lain Hati cabang Marga Jaya, Deputy Manager Summarecon Mall Bekasi, satpam Pasar Sinpansa Kota Bekasi, beberapa pedagang pasar Summarecon Mall Bekasi, dan beberapa pedagang kaki lima di sekitar Stadion Patriot Kota Bekasi sebagai public dari beberapa latar belakang pekerjaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan timbal balik antara kepercayaan public dan kinerja pemerintah daerah pada implemementasi kebijakan Large-Scale Social Restriction. Hubungan tersebut menunjukkan adanya sisi positif dan negative antara persepsi kedua belah pihak. Namun, komunikasi, informasi, dan transparansi masih menjadi fokus utama dalam hubungan kedua actor tersebut.

Maka dari itu, penulis menawarkan beberapa rekomendasi dari penelitian ini, berupa: (1) membuat sistem komunikasi yang ter integrasi antar pemerintah dan public berbasis pesan teknologi (2) mengadakan survei bulanan mengenai kepuasan public terhadap kinerja pemerintah selama implementasi kebijakan berjalan, dan (3) mengadakan hearing antara pemerintah kota dan public agar terciptanya persamaan tujuan dan komunikasi satu jalur.

*Kata Kunci : Kepercayaan Publik, Kinerja Pemerintah Daerah, Implementasi, PSBB*

## ABSTRACT

The central government issued policies related to crisis response due to the Covid-19, namely Large-Scale Social Restrictions which were initially implemented in DKI Jakarta as the epicenter of the spread of COVID-19 cases in Indonesia. However, the effect of the direct border between cities and the high mobilization of the satellite cities of DKI Jakarta, namely BoDeTaBek, has made Bekasi City one of the cities with a highrisk zone, making the Bekasi City Government also issue a Regulation in the form of Major Regulation Number 22 Year 2020. Because the implementation of this policy is still relatively new for the community, the pros and cons of this policy emerge and make the government continue to update the policy. Therefore, the researcher wants to analyze the relationship of the extent to which the public believes in the policy and how the position of public trust in the performance of the Bekasi City government.

This study uses qualitative research methods and applies descriptive research to find out deeper answers from both sides of the research subject. This study also uses interviews and observations as types of data. The research interview was conducted with the Governance Section Sub. Administrative Development Section of Bekasi City Regional Secretariat, Public Relation Manager of the Bekasi City Secretariat, Head of Disease Prevention and Control of The Bekasi City Health Office, Secretary of The Public Order Section SATPOL-PP Bekasi City from the local government side, then Head of RW.010 Harapan Baru Village Bekasi City as a public bridge with the government. Also, ThinkPolicy.id Content Writers, Coffee Barista Lain Hati Marga Jaya Branch, Deputy Manager for The Secretariat Summarecon Mall Bekasi, and Sinpansa Clean Market Security Bekasi City as public from several work backgrounds.

The results show that there is a reciprocal relationship between public trust and local government performance on the implementation of the Large-Scale Social Restriction policy. This relationship shows the existence of positive and negative sides between the perceptions of the two parties. However, communication, information, and transparency are still the main focus in the relationship between the two actors.

Therefore, the authors offer several suggestions from this research, in the form of: (1) making an integrated communication system between government and the public based on technology messages (2) conducting a monthly survey on public satisfaction with government performance during policy implementation, and (3) hold a hearing between the city government and the public in order to create common goals and one-way communication.

*Keywords: Public Trust, Local Government Performance, Implementation, PSBB*

